

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR KEP-200/BC/2025

TENTANG

PENATAAN WILAYAH KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL
BEA DAN CUKAI ATAS PENETAPAN BANDAR UDARA INTERNASIONAL DAN
BANDAR UDARA KHUSUS

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : a. bahwa bandar udara internasional dan bandar udara khusus telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 37 Tahun 2025 tentang Penetapan Bandar Udara Internasional dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 38 Tahun 2025 tentang Penggunaan Bandar Udara yang Dapat Melayani Penerbangan Langsung dari dan/atau ke Luar Negeri;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 293 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, perubahan lokasi dan wilayah kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sepanjang tidak melakukan perubahan nomenklatur serta pembentukan dan/atau pergeseran satuan kerja anggaran, ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai setelah mendapatkan rekomendasi dari Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan kinerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mendukung kelancaran pelayanan dan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai, perlu melakukan

penyesuaian wilayah kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berupa penataan unit organisasi non struktural Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai dan Pos Pengawasan Bea dan Cukai;

- d. bahwa berdasarkan nota dinas Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor ND-1104/SJ/2025 tanggal 24 September 2025, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan telah memberikan rekomendasi berupa izin prinsip persetujuan penataan wilayah kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas penetapan bandar udara internasional dan bandar udara khusus;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Penataan Wilayah Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas Penetapan Bandar Udara Internasional dan Bandar Udara Khusus;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1853) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1355);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PENATAAN WILAYAH KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI ATAS PENETAPAN BANDAR UDARA INTERNASIONAL DAN BANDAR UDARA KHUSUS.

KESATU : Menetapkan penataan wilayah kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas penetapan bandar udara internasional dan bandar udara khusus.

KEDUA : Terhadap penataan wilayah kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah dilakukan penyesuaian nama, tipe, dan wilayah kerja Kantor Pelayanan Utama, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai, dan Pos Pengawasan Bea dan Cukai yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
4. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Kementerian Keuangan;
5. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Keuangan;

6. Para Pejabat Eselon II di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
7. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
8. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus;
9. Para Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai;
10. Para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai;
11. Para Kepala Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai; dan
12. Para Kepala Balai Laboratorium Bea dan Cukai.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 Oktober 2025

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik

DJAKA BUDHI UTAMA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
 NOMOR KEP-200/BC/2025
 TENTANG PENATAAN WILAYAH KERJA INSTANSI
 VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI ATAS
 PENETAPAN BANDAR UDARA INTERNASIONAL DAN
 BANDAR UDARA KHUSUS

NAMA, TIPE, DAN WILAYAH KERJA KANTOR PELAYANAN UTAMA, KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN,
 KANTOR BANTU PELAYANAN BEA DAN CUKAI, DAN POS PENGAWASAN BEA DAN CUKAI

No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja		
				Daerah Administrasi Pemerintahan	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
1.	KPU Batam	B	Batam	Kota Batam	1. Hang Nadim (PU) 2. Batu Ampar (PL) 3. Sekupang (PL) 4. Telaga Punggur (PL) 5. Harbor Bay (PL) 6. Kantor Pos Lalu Bea Batam	1. Pulau Buluh (PL) 2. Tanjung Riau (PL) 3. Tanjung Uncang (PL) 4. Tanjung Piayu (PL) 5. Batu Besar Pantai (PL) 6. Sei Jodoh (PL) 7. Momoi (PL) 8. Tanjung Sauh (PL)

No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja		
				Daerah Administrasi Pemerintahan	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
					7. Sambu Belakang Padang	9. Pulau Ngenang (PL) 10. Pulau Janda Berhias (PL) 11. Tanjung Kasam (PL) 12. Nongsa (PL) 13. Sagulung (PL) 14. Macobar (PL) 15. Kabil (PL) 16. Pulau Galang Baru 17. Pulau Bulan 18. Tanjung Buntung 19. Pulau Rempang 20. Batam Kota 21. Pulau Layang (PL) 22. Pulau Pelampung 23. Sambu Belakang Padang (PL)

No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja		
				Daerah Administrasi Pemerintahan	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
2.	KPU Soekarno- Hatta	C	Kota Tangerang	Kota Tangerang pada Kawasan Bandara Soekarno- Hatta	1. Terminal 2 2. Terminal 3 Ultimate 3. Kantor Tukar Pos Udara Jakarta Soekarno-Hatta	1. Terminal 1 2. PT Taman Niaga Soewarna
	KANTOR WILAYAH DJBC ACEH					
3.	KPPBC Banda Aceh	Madya Pabean C	Kota Banda Aceh	1. Kota Banda Aceh 2. Kabupaten Aceh Besar kecuali Pulau Breuh, Pulau Nasi, Pulau Teunom dan pulau-pulau kecil di sekitarnya 3. Kabupaten Pidie 4. Kabupaten Pidie Jaya	1. Kantor Pos Lalu Bea Banda Aceh 2. Sultan Iskandar Muda (PU)	1. Lampulo (PL) 2. Sigli (PL) 3. Malahayati (PL) 4. Ulee Lheue (PL)

No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja		
				Daerah Administrasi Pemerintahan	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
	KANTOR WILAYAH DJBC SUMATERA UTARA					
4.	KPPBC Sibolga	Madya Pabean C	Kota Sibolga	1. Kota Sibolga 2. Kabupaten Tapanuli Tengah 3. Kabupaten Humbang Hasundutan 4. Kabupaten Tapanuli Utara 5. Kabupaten Tapanuli Selatan 6. Kota Padangsidimpuan 7. Kabupaten Padang Lawas 8. Kabupaten Padang Lawas Utara	1. Gunungsitoli (PL) 2. Raja Sisingamangaraja XII (PU)	1. Barus (PL) 2. Natal (PL) 3. Teluk Dalam (PL) 4. Pulau Tello (PL) 5. Sibolga (PL)

No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja		
				Daerah Administrasi Pemerintahan	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
				9. Kabupaten Mandailing Natal 10. Kabupaten Nias Selatan 11. Kabupaten Nias 12. Kota Gunungsitoli 13. Kabupaten Nias Barat 14. Kabupaten Nias Utara		
5.	KPPBC Kualanamu	Madya Pabean B	Kabupaten Deli Serdang	Kabupaten Deli Serdang pada Kawasan Bandara Kualanamu, Tempat Penimbunan Berikat, Tempat Penimbunan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara terkait Bandara Kualanamu dan Kantor Tukar Pos Udara Tanjung Morawa	1. Kantor Tukar Pos Udara Tanjung Morawa 2. Kualanamu (PU)	

No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja		
				Daerah Administrasi Pemerintahan	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
	KANTOR WILAYAH DJBC RIAU					
6.	KPPBC Pekanbaru	Madya Pabean B	Kota Pekanbaru	1. Kota Pekanbaru 2. Kabupaten Siak 3. Kabupaten Rokan Hulu 4. Kabupaten Kampar 5. Kabupaten Pelalawan kecuali Pos Pengawasan Serapung dan Pos Pengawasan Penyalai	1. Perawang (PL) 2. Rumbai (PL) 3. Rantau Panjang 4. Kantor Pos Lalu Bea Pekanbaru 5. Siak Sri Indrapura 6. Sultan Syarif Kasim II (PU)	1. Buatan (PL) 2. Pekanbaru (PL) 3. Pelabuhan Peti Kemas Teluk Lembu 4. Sungai Apit (PL) 5. Tanjung Buton (PL) 6. Siak Sri Indrapura (PL) 7. Sultan Syarief Haroen Setia Negara (PU)
7.	KPPBC Teluk Bayur	Madya Pabean B	Kota Padang	Seluruh wilayah administrasi Provinsi Sumatera Barat	1. Sikakap (PL) 2. Tua Pejat (PL)	1. Muara Padang (PL) 2. Siberut Mentawai 3. Pariaman (PL)

No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja		
				Daerah Administrasi Pemerintahan	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
					3. Minangkabau (PU) 4. Kantor Pos Lalu Bea Padang	4. Painan (PL) 5. Muara (PL) 6. Cubadak (PL) 7. Teluk Bayur (PL) 8. Tabing (PU) 9. Air Bangis (PL) 10. Bungus (PL)
	KANTOR WILAYAH DJBC KHUSUS KEPULAUAN RIAU					
8.	KPPBC Tanjungpinang	Madya Pabean B	Kota Tanjungpinang	1. Kota Tanjungpinang 2. Kabupaten Bintan 3. Kabupaten Lingga 4. Kabupaten Kepulauan Anambas	1. Kantor Pos Lalu Bea Tanjungpinang 2. Dabo Singkep 3. Tarempa	1. Tanjungpinang (PL) 2. Kijang (PL) 3. Tanjung Uban (PL) 4. Lagoi (PL) 5. Lobam (PL)

No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja		
				Daerah Administrasi Pemerintahan	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
				5. Kabupaten Natuna	4. Ranai 5. Raja Haji Fisabilillah (PU)	6. Penuba (PL) 7. Sungai Buluh (PL) 8. Senayang (PL) 9. Daik (PL) 10. Dabo (PU) 11. Dabo Singkep (PL) 12. Pulau Cempa 13. Pulau Tajur Biru 14. Udang Natuna 15. Matak 16. Serasan 17. Midai 18. Tambelan 19. Jemaja 20. Bunguran Barat 21. Bunguran Timur

No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja		
				Daerah Administrasi Pemerintahan	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
	KANTOR WILAYAH DJBC SUMATERA BAGIAN TIMUR					
9.	KPPBC Palembang	Madya Pabean B	Kota Palembang	Seluruh wilayah administrasi Provinsi Sumatera Selatan	1. Tanjung Buyut (PL) 2. Pusri (PL) 3. S.M. Badaruddin II (PU) 4. Kantor Pos Lalu Bea Palembang	1. Muara Enim 2. Sekayu 3. Lubuklinggau 4. Baturaja 5. Kertapati
10.	KPPBC Tanjungpandan	Madya Pabean C	Kabupaten Belitung	1. Kabupaten Belitung 2. Kabupaten Belitung Timur	1. Manggar (PL) 2. Kantor Pos Lalu Bea Tanjungpandan 3. Tanjungbatu (PL)	

No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja		
				Daerah Administrasi Pemerintahan	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
					4. H.A.S. Hanandjoeddin (PU)	
	KANTOR WILAYAH DJBC SUMATERA BAGIAN BARAT					
11.	KPPBC Bandar Lampung	Madya Pabean B	Kota Bandar Lampung	Seluruh wilayah administrasi Provinsi Lampung	1. Kota Agung 2. Radin Inten II (PU) 3. Kantor Pos Lalu Bea Bandar Lampung	1. Bakauheni (PL) 2. Seputih Mataram 3. Panjang (PL) 4. Labuhan Maringgai (PL) 5. Krui (PL) 6. Kalianda (PL)
	KANTOR WILAYAH DJBC JAKARTA					

No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja		
				Daerah Administrasi Pemerintahan	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
12.	KPPBC Jakarta	Madya Pabean A	Kota Jakarta Timur	1. Kota Administrasi Jakarta Timur 2. Kota Administrasi Jakarta Pusat 3. Kota Administrasi Jakarta Selatan	Halim Perdanakusuma (PU)	
	KANTOR WILAYAH DJBC JAWA BARAT					
13.	KPPBC Cirebon	Madya Pabean C	Kota Cirebon	1. Kota Cirebon 2. Kabupaten Cirebon 3. Kabupaten Majalengka 4. Kabupaten Kuningan 5. Kabupaten Indramayu	1. Balongan 2. Kantor Pos Lalu Bea Cirebon 3. Kertajati (PU)	1. Palimanan 2. Cirebon (PL) 3. Losari 4. Majalengka 5. Kuningan 6. Indramayu
	KANTOR WILAYAH DJBC					

No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja		
				Daerah Administrasi Pemerintahan	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
	JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA					
14.	KPPBC Tanjung Emas	Madya Pabean	Kota Semarang	Kota Semarang pada Kawasan Pelabuhan Tanjung Emas, Kawasan Bandara Ahmad Yani dan Kantor Pos Lalu Bea Semarang	1. Jenderal Ahmad Yani (PU) 2. Kantor Pos Lalu Bea Semarang	1. Tanjung Emas I (PL) 2. Tanjung Emas II (PL) 3. Tanjung Emas III (PL)
15.	KPPBC Surakarta	Madya Pabean B	Kabupaten Karanganyar	1. Kota Surakarta 2. Kabupaten Boyolali 3. Kabupaten Klaten 4. Kabupaten Sukoharjo 5. Kabupaten Karanganyar 6. Kabupaten Sragen 7. Kabupaten Wonogiri	1. Adi Soemarmo (PU) 2. Kantor Pos Lalu Bea Surakarta	1. Kebakkramat 2. Klaten 3. Karanganyar 4. Sragen 5. Sukoharjo 6. Wonogiri 7. Boyolali 8. Jebres

No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja		
				Daerah Administrasi Pemerintahan	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
16.	KPPBC Yogyakarta	Madya Pabean B	Kabupaten Sleman	1. Kabupaten Sleman 2. Kota Yogyakarta 3. Kabupaten Kulonprogo 4. Kabupaten Bantul 5. Kabupaten Gunung Kidul	1. Kantor Pos Lalu Bea Yogyakarta 2. Kulon Progo (PU)	1. Sleman 2. Wates 3. Bantul 4. Wonosari 5. Adi Sucipto (PU)
	KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR I					
17.	KPPBC Juanda	Madya Pabean	Kabupaten Sidoarjo	Kabupaten Sidoarjo pada Kawasan Bandara Juanda, Tempat Penimbunan Berikat terkait Bandara Juanda dan Kantor Pos Lalu Bea	1. Kantor Tukar Pos Udara Juanda 2. Kantor Pos Lalu Bea Surabaya 3. Terminal II	1. Terminal I 2. Kargo
	KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR II					

No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja		
				Daerah Administrasi Pemerintahan	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
18.	KPPBC Kediri	Madya Cukai	Kota Kediri	1. Kota Kediri 2. Kabupaten Kediri 3. Kabupaten Nganjuk 4. Kabupaten Jombang	1. Kantor Pos Lalu Bea Kediri 2. Kediri (PU)	1. Nganjuk 2. Kertosono 3. Cukir 4. Jombang
19.	KPPBC Banyuwangi	Madya Pabean C	Kabupaten Banyuwangi	Kabupaten Banyuwangi	1. Pantai Boom Marina 2. Banyuwangi (PU)	1. Tanjung Wangi (PL) 2. Ketapang (PL)
	KANTOR WILAYAH DJBC BALI, NUSA TENGGARA BARAT DAN NUSA TENGGARA TIMUR					

No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja		
				Daerah Administrasi Pemerintahan	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
20.	KPPBC Ngurah Rai	Madya Pabean	Kabupaten Badung	1. Kabupaten Badung pada Kawasan Bandara Ngurah Rai 2. Kota Denpasar pada Kantor Pos Lalu Bea Denpasar	1. Kantor Pos Lalu Bea Denpasar 2. I Gusti Ngurah Rai (PU)	
21.	KPPBC Mataram	Madya Pabean C	Kota Mataram	1. Kota Mataram 2. Kabupaten Lombok Barat 3. Kabupaten Lombok Tengah 4. Kabupaten Lombok Utara 5. Kabupaten Lombok Timur	1. Kantor Pos Lalu Bea Mataram 2. Zainuddin Abdul Madjid (PU)	1. Labuhan Haji (PL) 2. Labuhan Lombok (PL) 3. Selaparang (PU) 4. Lembar (PL) 5. Pemenang (PL)
22.	KPPBC Kupang	Madya Pabean C	Kota Kupang	1. Kota Kupang 2. Kabupaten Kupang 3. Kabupaten Timor Tengah Selatan 4. Kabupaten Rote Ndao	1. Waingapu (PL) 2. Kantor Pos Lalu Bea Kupang 3. El Tari (PU)	1. Tenau 2. Mau Hau (PU) 3. Tambolaka (PU) 4. Rua (PL) 5. Baa/Pulau Rote (PL)

No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja		
				Daerah Administrasi Pemerintahan	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
				5. Kabupaten Sabu Raijua 6. Kabupaten Sumba Timur 7. Kabupaten Sumba Tengah 8. Kabupaten Sumba Barat 9. Kabupaten Sumba Barat Daya		6. Oepoli
23.	KPPBC Labuan Bajo	Madya Pabean C	Kabupaten Manggarai Barat	1. Kabupaten Sikka 2. Kabupaten Ende 3. Kabupaten Nagekeo 4. Kabupaten Ngada 5. Kabupaten Manggarai Timur 6. Kabupaten Manggarai 7. Kabupaten Manggarai Barat 8. Kabupaten Flores Timur	1. Kedindi Reo (PL) 2. Ende (PL dan Pos Lalu Bea) 3. Larantuka (PL) 4. Kantor Pos Lalu Bea Maumere 5. Maumere 6. Komodo, Labuan Bajo (PU)	1. Labuan Bajo dan Komodo (PL) 2. Satartacik (PU) 3. Gewayangtama (PU) 4. Wai Oti (PU) 5. H. Aroeboesman (PU) 6. Padha Maleda (PU) 7. Maumere (PL) 8. Ende Ipi (PL)

No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja		
				Daerah Administrasi Pemerintahan	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
				9. Kabupaten Lembata		
	KANTOR WILAYAH DJBC KALIMANTAN BAGIAN BARAT					
24.	KPPBC Pontianak	Madya Pabean B	Kota Pontianak	1. Kota Pontianak 2. Kabupaten Mempawah 3. Kabupaten Kubu Raya	1. Supadio (PU) 2. Kantor Pos Lalu Bea Pontianak 3. Kijing (PL)	1. Jungkat (PL) 2. Pontianak (PL) 3. Sungai Kakap (PL) 4. Kubu (PL) 5. Teluk Air (PL) 6. Padang Tikar (PL)
	KANTOR WILAYAH DJBC KALIMANTAN BAGIAN SELATAN					

No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja		
				Daerah Administrasi Pemerintahan	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
25.	KPPBC Banjarmasin	Madya Pabean B	Kota Banjarmasin	1. Kota Banjarmasin 2. Kabupaten Barito Kuala 3. Kabupaten Tapin 4. Kabupaten Hulu Sungai Selatan 5. Kabupaten Hulu Sungai Tengah 6. Kabupaten Hulu Sungai Utara 7. Kabupaten Tabalong 8. Kabupaten Balangan 9. Kabupaten Banjar 10. Kota Banjarbaru 11. Kabupaten Tanah Laut	1. Kantor Pos Lalu Bea Banjarbaru 2. Syamsudin Noor (PU)	1. Warukin (PU) 2. Banjarmasin (PL) 3. Jorong (PL) 4. Asam-asam/Kintap (PL) 5. Terminal Apung IMPT
26.	KPPBC Kotabaru	Madya Pabean C	Kabupaten Kotabaru	1. Kabupaten Kotabaru 2. Kabupaten Tanah Bumbu		1. Satui (PL) 2. Bersujud (PU)

No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja		
				Daerah Administrasi Pemerintahan	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
	KANTOR WILAYAH DJBC KALIMANTAN BAGIAN TIMUR					
27.	KPPBC Balikpapan	Madya Pabean B	Kota Balikpapan	1. Kota Balikpapan 2. Kabupaten Penajam Paser Utara 3. Kabupaten Paser 4. Kabupaten Kutai Kartanegara pada Kecamatan Samboja	1. Tanah Grogot (PL) 2. Senipah (PL) 3. Kantor Pos Lalu Bea Balikpapan 4. Sultan Aji Muhammad Sulaiman (PU)	1. Semayang (PL) 2. Terminal Peti Kemas Kariangau (PL) 3. Balikpapan Coal Terminal (PLK) 4. Terminal Lawe-Lawe (PLK) 5. Kampung Baru (PLK) 6. Petrosea Offshore Supply Base (PLK) 7. Penajam Banua Taka (PLK) 8. Intipratama (PLK)

No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja		
				Daerah Administrasi Pemerintahan	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
						9. Dermaga Kencana Indonesia (PLK) 10. Kutai Chip Mill (PLK) 11. Senipah (PLK) 12. Teluk Waru 13. Teluk Adang
28.	KPPBC Samarinda	Madya Pabean B	Kota Samarinda	1. Kota Samarinda 2. Kabupaten Kutai Kartanegara kecuali Kecamatan Samboja 3. Kabupaten Kutai Barat 4. Kabupaten Mahakam Ulu	1. Tanjung Santan 2. Aji Pangeran Tumenggung Pranoto (PU)	1. Handil (PL) 2. Muara Sanga-sanga (PL) 3. Muara Badak (PL) 4. Tenggarong (PL) 5. Samarinda (PL) 6. Palaran (PL) 7. Tanjung Batu (PL)

No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja		
				Daerah Administrasi Pemerintahan	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
29.	KPPBC Tarakan	Madya Pabean B	Kota Tarakan	1. Kota Tarakan 2. Kabupaten Bulungan 3. Kabupaten Malinau 4. Kabupaten Tana Tidung 5. Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur	1. Bunyu (PL) 2. Tanjung Redep 3. Juwata (PU)	1. Bunyu (PL) 2. Tanjung Selor (PL) 3. Tanjung Redep (PU) 4. Malundung (PL) 5. Long Nawang 6. Malinau
	KANTOR WILAYAH DJBC SULAWESI BAGIAN SELATAN					
30.	KPPBC Makassar	Madya Pabean B	Kota Makassar	1. Kota Makassar 2. Kabupaten Maros 3. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 4. Kabupaten Gowa	1. Bantaeng/Pulau Selayar (PL) 2. Biringkassi (PL) 3. Kantor Pos Lalu Bea Makassar	1. Bantaeng (PL) 2. Bulukumba (PL) 3. Paotere (PL) 4. Sukarno I (PL) 5. Sukarno II (PL)

No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja		
				Daerah Administrasi Pemerintahan	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
				5. Kabupaten Takalar 6. Kabupaten Jeneponto 7. Kabupaten Bantaeng 8. Kabupaten Bulukumba 9. Kabupaten Kepulauan Selayar 10. Kabupaten Bone 11. Kabupaten Sinjai	4. Bajoe 5. Sultan Hasanuddin (PU)	6. Hatta I (PL) 7. Hatta II (PL) 8. Bajoe (PL) 9. Arasoe 10. Sinjai 11. Uloe (PL) 12. Pattiro
	KANTOR WILAYAH DJBC SULAWESI BAGIAN UTARA					
31.	KPPBC Pantoloan	Madya Pabean C	Kota Palu	1. Kota Palu 2. Kabupaten Donggala 3. Kabupaten Parigi Moutong 4. Kabupaten Tolitoli	1. Tolitoli (PL) 2. Mutiara Sis Al Jufri (PU)	1. Sabang (PL) 2. Parigi (PL) 3. Ogotua (PL) 4. Leok 5. Pantoloan (PL)

No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja		
				Daerah Administrasi Pemerintahan	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
				5. Kabupaten Buol 6. Kabupaten Sigi 7. Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat		6. Pasang Kayu (PL) 7. Donggala
32.	KPPBC Morowali	Madya Pabean C	Kabupaten Morowali	1. Kabupaten Morowali 2. Kabupaten Morowali Utara 3. Kabupaten Poso		1. Kasiguncu (PU) 2. Moahino/Bohumbelu (PL) 3. Poso (PL) 4. Kolonedale (PL) 5. Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) (PU)
33.	KPPBC Manado	Madya Pabean C	Kota Manado	1. Kota Manado 2. Kabupaten Minahasa Utara pada Kecamatan Wori, Kecamatan	1. Labuhan Uki (PL) 2. Tahuna (PL) 3. Hulu Siau (PL) 4. Marore (PL)	1. Inobonto (PL) 2. Tagulandang (PL) 3. Manado (PL) 4. Molibagu (PL)

No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja		
				Daerah Administrasi Pemerintahan	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
				Talawaan dan Kecamatan Kalawat 3. Kabupaten Minahasa pada Kecamatan Tombariri, Kecamatan Pineleng, Kecamatan Tombulu, Kecamatan Sonder, Kecamatan Tondano Utara, Kecamatan Tondano Barat, Kecamatan Tondano Selatan, Kecamatan Kawangkoan, Kecamatan Kawangkoan Barat dan Kecamatan Kawangkoan Utara 4. Kota Tomohon 5. Kota Kotamobagu	5. Miangas (PL) 6. Amurang (PL) 7. Lirung (PL) 8. Kantor Pos Lalu Bea Manado 9. Sam Ratulangi (PU)	5. Petta (PL)

No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja		
				Daerah Administrasi Pemerintahan	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
				6. Kabupaten Bolaang Mongondow 7. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 8. Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro 9. Kabupaten Kepulauan Sangihe 10. Kabupaten Kepulauan Talaud 11. Kabupaten Minahasa Selatan		
	KANTOR WILAYAH DJBC MALUKU					

No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja		
				Daerah Administrasi Pemerintahan	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
34.	KPPBC Ambon	Madya Pabean C	Kota Ambon	1. Kota Ambon 2. Kabupaten Maluku Tengah 3. Kabupaten Buru 4. Kabupaten Buru Selatan 5. Kabupaten Seram Bagian Timur 6. Kabupaten Seram Bagian Barat	1. Pattimura (PU) 2. Kantor Pos Lalu Bea Ambon	1. Banda (PL) 2. Namlea (PL) 3. Geser (PL) 4. Wainibe/Pulau Buru (PL) 5. Tulehu (PL) 6. Opin/Pasahari (PL) 7. Ambon (PL)
35.	KPPBC Ternate	Madya Pabean C	Kota Ternate	1. Kota Ternate 2. Kota Tidore Kepulauan 3. Kabupaten Halmahera Barat 4. Kabupaten Halmahera Utara 5. Kabupaten Pulau Morotai	1. Pulau Gebe (PL) 2. Galela/Tobelo (PL) 3. Pulau Mangole (PL) 4. Kantor Pos Lalu Bea Ternate	1. Labuha (PL) 2. Babullah (PU) 3. Bastiong (PL) 4. Tanjung Barnabas (PL) 5. Ternate (PL) 6. Sanana (PL) 7. Weda Bay (PU)

No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja		
				Daerah Administrasi Pemerintahan	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
				6. Kabupaten Halmahera Timur 7. Kabupaten Halmahera Tengah 8. Kabupaten Halmahera Selatan 9. Kabupaten Kepulauan Sula 10. Kabupaten Pulau Taliabu		
	KANTOR WILAYAH DJBC KHUSUS PAPUA					
36.	KPPBC Sorong	Madya Pabean C	Kota Sorong	1. Kota Sorong 2. Kabupaten Sorong 3. Kabupaten Sorong Selatan 4. Kabupaten Raja Ampat	1. Teluk Kasim (PL) 2. Kantor Pos Lalu Bea Sorong 3. Domine Eduard Osok (PU)	1. Arar (PL) 2. Sorong (PL) 3. Pelabuhan Khusus Perikanan Sorong (PL)

No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja		
				Daerah Administrasi Pemerintahan	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
				5. Kabupaten Maybrat 6. Kabupaten Tambrau		4. Pelabuhan Khusus Perikanan Klalin (PL) 5. Pelabuhan Waisai (PL)
37.	KPPBC Jayapura	Madya Pabean C	Kota Jayapura	1. Kota Jayapura 2. Kabupaten Jayapura 3. Kabupaten Jayawijaya 4. Kabupaten Sarmi 5. Kabupaten Pegunungan Bintang 6. Kabupaten Keerom 7. Kabupaten Mamberamo Raya 8. Kabupaten Mamberamo Tengah 9. Kabupaten Nduga 10. Kabupaten Lanny Jaya	1. Sentani (PU) 2. Skouw (LBD) 3. Kantor Pos Lalu Bea Jayapura 4. Hamadi (PL)	1. Sarmi (PL) 2. Kiwirok 3. Senggi (PL) 4. Waris 5. Wembi (PL) 6. Demta (PL) 7. Wamena 8. Jayapura (PL) 9. Batom 10. Arso Timur

No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja		
				Daerah Administrasi Pemerintahan	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
				11. Kabupaten Tolikara 12. Kabupaten Yahukimo 13. Kabupaten Yalimo		
38.	KPPBC Biak	Madya Pabean C	Kabupaten Biak Numfor	1. Kabupaten Biak Numfor 2. Kabupaten Kepulauan Yapen 3. Kabupaten Waropen 4. Kabupaten Supiori 5. Kabupaten Nabire 6. Kabupaten Paniai 7. Kabupaten Intan Jaya 8. Kabupaten Dogiyai 9. Kabupaten Puncak 10. Kabupaten Puncak Jaya	1. Kantor Pos Lalu Bea Biak 2. Nabire 3. Frans Kaisiepo (PU)	1. Serui (PL) 2. Dawai (PL) 3. Biak (PL) 4. Waren 5. Enarotali
39.	KPPBC Merauke	Madya Pabean C	Kabupaten Merauke	1. Kabupaten Merauke 2. Kabupaten Boven Digul 3. Kabupaten Asmat	1. Sota (LBD) 2. Yetetkeun 3. Mopah (PU)	1. Asiki 2. Bupul (LBD) 3. Mindiptana (LBD)

No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja		
				Daerah Administrasi Pemerintahan	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
				4. Kabupaten Mappi		4. Agats (PL) 5. Bade (PL) 6. Merauke (PL) 7. Wanam (PL)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2025

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik
DJAKA BUDHI UTAMA

